

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syarat untuk keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk yang besar menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar pula, seperti kebutuhan pangan, sandang serta kesempatan kerja. Selain itu, jumlah masyarakat yang besar berpotensi untuk mengolah sumber-sumber alam yang tersedia dan menghasilkan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat dituntut untuk bekerja dan berperan aktif dalam pekerjaannya. “Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain¹”.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terdapat pada alinea ke empat:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu:

¹Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 1.

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

Indonesia merupakan negara hukum. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum yang berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan².

Dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi yang berpaham konstitualisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari permasalahan hukum dan merupakan pembangunan nasional dan hak bagi setiap tenaga kerja berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan bahwa “*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”.

Masyarakat dituntut untuk memiliki pekerjaan demi kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya, baik sebagai pekerja tetap maupun sebagai pekerja kontrak. Secara yuridis, istilah pekerja kontrak maupun pekerja tetap menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut sebagai perjanjian kerja waktu untuk tertentu dan perjanjian kerja untuk

²Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

waktu tidak tertentu. Salah satu bentuk perjanjian kerja yang marak hari ini adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT. Menurut Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. *Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;*
- b. *Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
- c. *Pekerjaan yang bersifat musiman;*
- d. *Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.*

PKWT diadakan karena jenis dan sifat pekerjaan yang menjadi obyek perjanjian kerjanya tersebut memang mengharuskan demikian. Misalnya pekerjaan yang obyek perjanjian kerja adalah suatu pembangunan sebuah gedung. Maka dalam membuat perjanjian kerja untuk dijadikan dasar hubungan kerja atas pekerjaan tersebut, adalah wajar jika pembuatannya dilakukan dalam bentuk PKWT. Karena pekerjaan yang menjadi obyek perjanjian tersebut menurut sifat dan jenisnya dalam waktu tertentu akan habis.

Terhadap PKWT, pihak perusahaan harus memberikan perlakuan yang sama dengan pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa *“setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan”*. Walaupun memiliki banyak persamaan dengan pekerja tetap, pekerja PKWT memiliki keterbatasan hak dibandingkan dengan pekerja tetap yang sering menimbulkan keresahan dikalangan pekerja dan sering menimbulkan protes. Menurut Much. Nurachmad, meskipun PKWT sering mendapatkan diskriminasi, dalam praktiknya terhadap pekerja PKWT memang ada pembatasannya, yaitu³:

³Much. Nurachmad, *Hak-Hak Tenaga Kerja Kotrak*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 81-82.

- “1. PKWT mempunyai keterbatasan dalam hal struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah disusun berdasarkan analisis jabatan, dan evaluasi jabatan. Data yang digunakan untuk menggunakan analisa, uraian dan evaluasi jabatan berupa bidang usaha dari perusahaan yang bersangkutan, tingkat teknologi yang digunakan, struktur organisasi, serta manajemen perusahaan. Karena hanya menjalankan tugas pada waktu tertentu (musiman), sementara dan hanya mengerjakan pekerjaan yang bersifat pelengkap, perusahaan berhak membatasi struktur dan skala pengupahan bagi pekerja kontrak.
2. Berbeda dengan pekerja tetap, pekerja kontrak tidak mendapat pesangon jika masa kerja telah berakhir”.

Salah satu perusahaan yang mempekerjakan pekerjaanya dengan PKWT adalah PT Astra Credit Company Finance (PT ACC Finance) kota Bukittinggi. PT ACC Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan mobil terbesar di Indonesia. PT ACC Finance menyediakan pelayanan pembiayaan untuk pembelian mobil baru ataupun mobil bekas khususnya untuk merek kendaraan yang diproduksi oleh Astra seperti, Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, dan BMW.

Selanjutnya dalam pasal 78 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa *“pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur”*.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan ditetapkan bahwa perusahaan tidak boleh memperlakukan pekerjaanya dengan perlakuan yang berbeda. Persoalannya ketentuan yang dimaksud oleh sales ataupun marketing pada PT ACC Finance dinilai tidak dilaksanakan dengan baik. Di dalam ketentuannya, sebagaimana yang telah diatur dalam ayat (2) pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan waktu kerja adalah:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

- b. 8 (delapan) jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Tetapi perusahaan memberlakukan jam kerja pada PT Acc Finance Kota Bukittinggi khususnya bagi pekerja yang diikat dengan sistem PKWT adalah selama 8 (delapan) jam sehari 48 (empat puluh delapan) jam seminggu dan untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu. Itu artinya perusahaan sudah melakukan penyimpangan waktu kerja selama 8 (delapan) jam dalam seminggu dan tidak membayar upah kerja lembur selama 8 (delapan) jam kepada pekerja⁴. Secara yuridis, tidak ada salahnya pekerja bekerja melebihi dari waktu kerja yang telah ditentukan asal dengan persetujuan dari perusahaan dan pekerja dan kepadanya diberikan upah lembur. Menurut pasal 78 ayat (2) pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur itu kepada seluruh pekerja yang bekerja lembur tanpa terkecuali.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang :
**PERLINDUNGAN WAKTU KERJA TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU DI PT ASTRA CREDIT COMPANY FINANCE KOTA
BUKITTINGGI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan waktu kerja terhadap pekerja perjanjian kerja waktu tertentu di PT Astra Credit Company Finance Kota Bukittinggi?

⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frenki, pegawai PT Acc Finance Kota Bukittinggi pada Hari Selasa 9 Juni 2015 pukul 11.00 WIB.

2. Apa yang menjadi kendala perlindungan waktu kerja pekerja perjanjian kerja waktu tertentu di PT Astra Credit Company Finance Kota Bukittinggi dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan waktu kerja terhadap pekerja perjanjian kerja waktu tertentu di PT Astra Credit Company Finance Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan waktu kerja terhadap pekerja perjanjian kerja waktu tertentu di PT Astra Credit Company Finance Kota Bukittinggi dan cara mengatasinya.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
 - b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek dilapangan.
 - c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang administrasi pada khususnya.



- d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik tenaga kerja, pemerintah dan khususnya pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah⁵.

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *yuridis sosiologis*. *Yuridis sosiologis* yaitu metode yang memuat penelitian untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat dan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti⁶. Dalam penelitian penulis melakukan wawancara tentang perlindungan waktu kerja terhadap pekerja perjanjian kerja waktu tertentu di PT ACC Finance Kota Bukittinggi.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 1.

⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Menurut Irawan Soehartono⁷ “bahwa penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi”, yaitu metode yang memuat peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat dan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti berkaitan dengan perlindungan waktu kerja pekerja perjanjian kerja waktu tertentu di PT ACC Finance Kota Bukittinggi.

3. Jenis dan sumber data

Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah

a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan melakukan penelitian di PT ACC Finance Kota Bukittinggi⁸, dan Dinsosnaker Agam.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan hukum, berupa⁹:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63.

⁸ *Ibid.*, hlm 143.

⁹ *Ibid.*,

b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/IV/2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Misalnya hasil seminar maupun teori-teori.

3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya penggunaan kamus-kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, pihak perusahaan PT ACC Finance. Jenis teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah *random sampling/ probability sampling*, yaitu suatu teknik sampling yang dipilih secara acak, setiap unsur populasi harus memiliki kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini penulis berhasil mewawancarai Bapak Frengki selaku pegawai PT ACC Finance, Ibu Admiwati dan Ibu Novi selaku pegawai di Dinsosnaker Agam.

2. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan waktu kerja terhadap pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan menyusun hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di analisis. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

b. Analisis Data

Data-data yang telah diolah sebelumnya dianalisa lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini data yang dikumpulkan akan dianalisis dan disampaikan secara kualitatif, melalui uraian deskriptif yang dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini, yakni pelaksanaan, permasalahan serta penyelesaian masalah dalam pelaksanaan perlindungan waktu kerja terhadap pekerja perjanjian kerja waktu tertentu di PT ACC Finance Kota Bukittinggi.